

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan aktivitas yang kompleks, yang efektivitasnya sangat bergantung pada kerjasama setiap aktor yang terlibat (Inneke et al., 2013; Mosher, 1991). Pembangunan pertanian tidak hanya menjadi tanggung jawab petani, tetapi juga merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan (Gaffney et al., 2019). Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan upaya pengelolaan dan konservasi yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan menerapkan teknik produksi yang layak secara ekonomi dan sosial (Purba & Sipayung, 2017). Tantangan dalam implementasi praktik pertanian berkelanjutan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dan realitas di lapangan, termasuk dalam hal teknologi, akses ke pasar, dan dukungan kebijakan.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menjaga daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang sebagai tujuan dari pembangunan berkelanjutan (Rivai & Anugrah, 2016). Salah satunya, untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, maka diperlukan upaya mengurangi jumlah angka kemiskinan (Mucharam et al., 2022) melalui berbagai program ekonomi produktif yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dengan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan (Kementerian PPN, 2020). Hal ini penting karena sektor pertanian memiliki populasi masyarakat miskin terbesar dibandingkan dengan sektor lain (Mucharam et al., 2022).

Tujuan besar pembangunan pertanian tersebut belum dapat diwujudkan secara maksimal terutama pada pertanian yang dikelola oleh rakyat. Subsektor perkebunan rakyat misalnya, merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan pertanian yang dikelola oleh masyarakat, memiliki potensi besar sebagai tulang punggung kemakmuran bangsa (Ramadhani et al., 2021; Wijaksana et al., 2017; Wulandari, 2015), subsektor ini memberikan kontribusi signifikan

terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penerimaan devisa dari ekspor, serta menyediakan bahan baku bagi industri pertanian lanjutan. Meskipun demikian, subsektor ini masih menghadapi tantangan dalam bersaing secara global (Hariance et al., 2015; Kementerian Pertanian, 2021). Peningkatan daya saing menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang kuat melalui sebuah sistem yang disebut sistem Agribisnis (Hari & Harmi, 2012; Hermawan, 2006; Mosher, 1991).

Sistem agribisnis diharapkan dapat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, mengkomersialisasikan hasil produksi, serta mendorong pembangunan ekonomi wilayah (Ali & Islam, 2011; Sarma & Raha, 2017). Namun, tantangan dalam penerapan sistem agribisnis yang efektif menunjukkan bahwa seringkali terdapat hambatan struktural dan operasional yang menghalangi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Agar agribisnis perkebunan rakyat dapat bersaing secara efektif, diperlukan langkah-langkah yang responsif terhadap dinamika pasar dan dilaksanakan dengan efisien (Bambang, 2016). Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah melalui pengembangan peran kelompok dalam pengendalian pasokan sistem agribisnis melalui institusi yang kokoh (Habermas, 2007). Keberadaan institusi ini menjadi krusial dalam menjamin kelancaran sistem agribisnis, mengatur proses pertukaran dan interaksi sosial, politik, kultural, dan ekonomi, serta memastikan pengaturan yang efektif dan efisien terhadap risiko dan ketidakpastian (Syahyuti, 2011).

Meskipun demikian, hingga saat ini, lembaga-lembaga yang ada belum sepenuhnya mampu mendukung sistem agribisnis karena pembentukannya masih terpusat pada inisiatif dari pihak eksternal. Menurut Olson (2002), pembentukan institusi yang solid memerlukan inisiatif kolektif dari pihak-pihak terlibat. Aksi kolektif ini memungkinkan partisipasi sukarela setiap individu dalam pelaksanaan dan pengawasan aktivitas institusi (Ostrom, 1998). Aksi kolektif juga dapat merangsang produktivitas dan meningkatkan kendali atas teknologi, dengan memprioritaskan motif pencarian kebenaran secara kolaboratif

(Habermas, 2007), yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak (Ostrom, 1998).

Aksi kolektif menjadi instrumen penting untuk meraih sejumlah manfaat dalam konteks agribisnis. Seperti efisiensi, jaminan pasar, pengurangan biaya transaksi, akses ke kredit, dan kemudahan dalam memperoleh faktor produksi. Salah satu bentuk aksi kolektif yang umum dilakukan adalah melalui organisasi koperasi (Kaganzi et al., 2009; Markelova et al., 2009; Mujawamariya et al., 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Mujawamariya dkk., (2013) tentang *Side-Selling in Cooperatif* menunjukkan bahwa kepercayaan dalam koperasi mampu menciptakan transaksi yang berkelanjutan bagi petani. Hal ini menegaskan pentingnya peran lembaga seperti koperasi dalam mendukung sistem agribisnis yang berdaya saing. Dengan demikian, aksi kolektif yang dilakukan dalam agribisnis bukan hanya bertujuan untuk memperoleh manfaat individu, tetapi juga untuk membangun keberlangsungan dan stabilitas dalam rantai pasok agribisnis. Ini sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing subsektor perkebunan rakyat yang menjadi fokus penelitian ini.

Sesuai dengan konteks agribisnis, koperasi menjadi instrumen yang sangat relevan dalam memperkuat aksi kolektif dan meningkatkan daya saing subsektor perkebunan rakyat. Koperasi dapat didefinisikan sebagai institusi sosial yang didirikan oleh individu secara sukarela, dikelola secara demokratis, dan diatur secara hukum, dengan tujuan sosial dan ekonomis untuk melindungi anggotanya dari dominasi perusahaan komersial besar yang bersifat monopolistik atau oligopolistik (Altman, 2015; Birchall & Ketilson, 2009; International Labour Organization & International Cooperative Alliance, 2015). Koperasi berbeda dengan lembaga sosial murni yang bertujuan untuk amal (Wilson, 2017). Perbedaan ini mirip dengan perbedaan antara *Social Enterprise* (Organisasi Non-Profit) dan *Social Entrepreneurship* (Defourny & Nyssens, 2013) terutama dalam hal *reward* yang diperoleh. Koperasi didirikan dengan tujuan ekonomi, yaitu untuk mendistribusikan kebutuhan, tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk seluruh komunitas melalui kerjasama yang dilakukan oleh para anggota. Hubungan ini memungkinkan mereka mempertahankan akses terhadap pasar, yang merupakan tantangan utama bagi masyarakat ekonomi lemah (Beber et al., 2018).

Hal ini mendorong anggota untuk melindungi aset mereka, mendorong partisipasi masyarakat, dan berbagi sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki. Sebab sistem manajemen yang berasal dari dalam diri dipercaya akan dapat meningkatkan partisipasi anggota dan karyawan/pekerja dalam koperasi (Avsec & Štromajer, 2015) karena adanya keuntungan/manfaat (*reward*) yang akan mereka peroleh (Wilson, 2017). Dimana, peningkatan manfaat pada satu aktor akan mendorong peningkatan manfaat pada aktor lainnya (Anauati et al., 2016), ini sejalan dengan motif aksi kolektif menurut Ostrom, (1998). Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi wadah untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi anggotanya, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat solidaritas dan kemandirian ekonomi dalam komunitas pertanian, sesuai dengan semangat peningkatan daya saing subsektor perkebunan rakyat.

Keuntungan atau *reward* harus dinikmati secara adil oleh semua pihak yang terlibat dalam aksi kolektif dalam koperasi, sebagaimana dalam pengelolaan bisnis (Saleh, 2020). Dalam konteks bisnis, efek *reward* dinilai dari dua aspek: efisiensi dalam memenuhi kebutuhan individu, dan kontribusi *reward* terhadap pencapaian tujuan bisnis oleh semua pihak yang terlibat pada aksi kolektif dalam koperasi seperti bagaimana sebuah bisnis dijalankan (Franco & Gomez, 2018; Journals, n.d.; Kanungo & Mendonca, 1992; Kressler, 2003; Walz, n.d.; H. Wang, 2011).

Aturan pengalokasian *reward* sangatlah penting dalam aktifitas bisnis yang berbentuk kooperatif (Toyoizumi, 2009). Dalam koperasi, *reward* dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU), yang dibagikan kepada setiap anggota sesuai dengan kontribusi usaha individu mereka (Batubara, 2012; Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, 1992), Selain untuk anggota, *reward* juga berdampak pada pemerintah dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan pendapatan masyarakat, seperti yang terjadi di Eropa, Amerika, dan beberapa negara Asia (Williams, 2016). Sebagai contoh, India telah berhasil memimpin di bidang ekonomi dengan komitmennya terhadap globalisasi melalui koperasi. Bagi pihak swasta yang berkolaborasi dengan koperasi, *reward* dapat berupa penyediaan bahan baku yang berkelanjutan, kelangsungan usaha, dan peningkatan kapasitas bisnis (Irawan, 2018).

Praktek aksi kolektif yang dilaksanakan oleh multipihak dapat dilihat pada Program Alih Profesi (PAF) yang dilakukan pada daerah sungai Donan (Rosyadi & Ardhi, 2012). Tindakan kolektif terjadi karena pengelolaan daerah aliran sungai yang dipenuhi oleh jaring apung sehingga mengganggu aktifitas industri semen Holcim. Pemerintah berupaya untuk mengatasinya lewat regulasi, namun masih gagal menertibkan masyarakat nelayan, karena bagi nelayan, jaring apung adalah sumber pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Program ini menghadapi kegagalan karena biaya kompensasi atas jaring apung yang dimiliki oleh nelayan tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh dari aktivitas jaring apung. Hal ini membuktikan bahwa tindakan kolektif bisa mengalami kegagalan ketika *reward* yang diperoleh oleh salah satu pihak tidak sebanding dengan korbanan yang telah mereka keluarkan (Rosyadi & Ardhi, 2012).

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan koperasi yang berkelanjutan melalui tindakan kolektif penting untuk menemukan bagaimana *reward system* yang akan diterima secara adil dan berkelanjutan oleh semua pihak yang berkontribusi. Aksi kolektif melalui koperasi dilakukan oleh beberapa negara di dunia seperti Finlandia, Scotlandia, Denmark, China, Jepang, USA, Srilanka, Jerman, Prancis, Swedia, Slovenia dan Kenya yang mencatat keberhasilan mereka membangun koperasi sebagai perekonomian rakyat (Avsec & Štromajer, 2015); (Loubere & Zhang, 2015) (Herbel et al., 2015); (Thompson, 2015); (Brummer, 2018); (Sopanen, 2013); (Birchall, 2009). Bahkan Birchall & Ketilson (2009) menyatakan bahwa pada masa terjadinya krisis ekonomi dan keuangan yang memberikan dampak negatif bagi banyak perusahaan, namun koperasi di seluruh dunia mampu bertahan dan tidak terkena dampak. Koperasi mampu menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi krisis. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa membangun koperasi sebagai sebuah gerakan aksi kolektif antara masyarakat, pasar (swasta) dan negara (pemerintah) dapat berhasil dilakukan untuk memperoleh kesetaraan yang berkelanjutan dan bersifat inklusif bagi semua (Leach et al., 2016).

Beberapa hasil penelitian tentang koperasi yang ada di dunia mengungkap bahwa, koperasi muncul sebagai sebuah gerakan yang berasal dari bawah karena adanya ketimpangan pendapatan, kegagalan pasar, kebutuhan akan akses dan

kepemilikan lahan, rasa kemanusiaan, serta adanya kebutuhan akan relasi/hubungan (Avsec & Štromajer, 2015b; Beber et al., 2018; Borzaga & Galera, 2015; Cliquet, Gerard et al., 2007; Defourny & Nyssens, 2013; Redmile, 1998; Wilson, 2017; Wittman et al., 2017). Di Indonesia sendiri, koperasi bukanlah sebuah organisasi ekonomi baru, pokok pikiran Bung Hatta (Hatta, 2018) tentang koperasi juga dimulai dari pemahamannya tentang gerakan kedaulatan rakyat, yang berarti berkehendak atas kemufakatan bersama, bergerak dalam susunan yang teratur dan merdeka. Untuk dapat mampu menentukan nasibnya sendiri, rakyat semestinya mengetahui dan pandai dalam menjalankan azas, mengatur dan menjaga dirinya sendiri (Kahar & Susila, 2012; Suratman & Rusidi., 1992). Namun rakyat tidak dapat bergerak sendiri, harus memiliki pemimpin yang dapat menggerakkannya dan menjadi wakil untuk menyuarakan kepentingan mereka, yang kemudian diharapkan mampu mendorong gerakan individu menjadi gerakan kolektif yang memiliki tujuan bersama untuk koperasi yang berkelanjutan (Hatta, 2018).

Koperasi sebagai sebuah lembaga dapat berperan sebagai lembaga keuangan, lembaga peyuluhan, dan lembaga pemasaran untuk menunjang agribisnis. Agar dapat membangun agribisnis yang berkelanjutan maka hal kunci yang harus diperhatikan adalah proses pembentukan koperasi haruslah didasari atas tindakan transformasi sosial melalui aksi kolektif atau kesadaran individu-individu. Tindakan aksi bersama membangun koperasi dengan tujuan untuk kesejahteraan anggota juga dilakukan oleh masyarakat beberapa negara didunia yang ingin terlepas dari persoalan ekonomi yang mereka hadapi. Koperasi-koperasi tersebut kemudian berkembang menjadi koperasi yang mampu menjalin aksi kolektif dengan pekerja, konsumen, produsen, investor, dan/atau pemangku kepentingan. Hal ini terjadi karena anggota kesulitan mempertahankan koperasi disaat menghadapi krisis karena kemampuan mereka dalam menghimpun modal yang sangat kecil, maka aksi multipihak perlu untuk dilakukan (Alho, 2016).

Pada awal tahun 2022 pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian KUKM mengumumkan peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang model koperasi multipihak sebagai upaya untuk membangun koperasi modern yang mampu bersaing dengan perusahaan yang murni berorientasi bisnis. Karena koperasi juga

harus bertransformasi untuk memenuhi tantangan era disruptif ekonomi (Kementrian KUKM, 2021). Koperasi multipihak yang dimaksud oleh Kementrian KUKM adalah koperasi dengan model pengelompokan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam satu lingkup usaha tertentu disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi dan kebutuhan anggota.

Penelitian tentang aksi kolektif oleh multipihak melalui koperasi, melibatkan petani, swasta, dan pemerintah, menjadi sangat penting terutama dalam mendukung pembangunan perkebunan rakyat yang berkelanjutan. Perkebunan rakyat dalam skala kecil membutuhkan organisasi sebagai platform untuk pengembangan usaha dan penggerak agribisnis secara menyeluruh agar dapat tetap bersaing. Namun, saat ini, koperasi masih sering kali hanya dianggap sebagai gerakan individu (petani) demi mencapai tujuan bersama. Kondisi ini, masih belum mampu membentuk koperasi agribisnis yang memiliki daya saing dan berkesinambungan, terutama karena petani dengan skala usaha kecil seringkali tidak memiliki akses yang memadai untuk menghimpun modal guna mengembangkan agribisnis mereka secara lebih luas. Oleh karena itu, koperasi seharusnya dapat menjadi wadah bagi gerakan kolektif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk petani, swasta, dan pemerintah. Namun, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan *reward system* yang efektif sebagai salah satu syarat utama agar koperasi dapat menjadi entitas bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian dalam konteks ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana aksi kolektif melalui koperasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor perkebunan rakyat.

B. Rumusan Masalah

Di Indonesia, sejak pertama dimulai pergerakan koperasi tidak terlepas dari intervensi pemerintah. Pengembangan koperasi secara swadaya baru dimulai pada tahun 1984, dan pengembangan koperasi dimasukkan dalam perencanaan pembangunan 5 tahun Indonesia. Peran Koperasi selama 30 tahun adalah dalam penyediaan sarana produksi hingga pemasaran (**Error! Reference source not found.**). Keterikatan petani dengan Koperasi saat itu sangat kuat, namun perubahan peraturan setelah masa reformasi membuat peran koperasi melemah dalam menjaga

stabilitas pangan (Susilo, 2013). Pada kenyataannya Koperasi masih sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, belum merupakan lembaga yang berasal dari komunitas petani itu sendiri. Oleh karena itu perkembangan koperasi menjadi tidak begitu baik, jumlah koperasi pertanian di Indonesia sangat banyak namun dampaknya terhadap pendapatan nasional masih rendah (Widjajani & Hidayati, 2014).

Kemudian temuan pra-penelitian lapangan yang dilakukan pada Koperasi Produsen Teh Organik Sebelas Jurai Saiyo disingkat dengan KPTO-SJS di Bukit Gompong Kabupaten Solok, menunjukkan hasil bahwa koperasi yang terbentuk adalah atas dasar keinginan individu (*Self Awareness*) petani. Koperasi telah menghasilkan produk teh organik dengan kualitas premium yang diberi nama LUGU's Premium Tea, yang diolah dari pucuk teh yang dihasilkan oleh petani kebun rakyat.

Perkebunan teh rakyat telah dilaksanakan di Kabupaten Solok sejak tahun 1987 oleh PT. Perkebunan Nusantara VI di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Namun hingga tahun 2007 usaha perkebunan teh rakyat tersebut belum mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan petani. Maka, pada tahun 2007 Yayasan Cerdas bersama dengan pemerintah Kabupaten Solok menggagas pengembangan teh organik dan menanam sebanyak 150 Ha di Nagari Aia Batumbuak dengan model pengelolaan usaha perkebunan teh organik terpadu yang kemudian mulai berjalan pada tahun 2008 (KPTO, 2018).

Sampai pada tahun 2017 jumlah petani yang tergabung kedalam pengelolaan teh organik terpadu ini semakin meningkat. Petani yang sebelumnya terikat kepada sistem ijon kemudian mengambil kembali kebun teh mereka dan bergabung kedalam koperasi. Pada tahun 2018 jumlah petani yang tergabung kedalam koperasi tercatat sebanyak 99 orang. Namun temuan pra penelitian pada tahun 2021 memberikan informasi bahwa KPTO- SJS mengalami kemunduran dalam pengelolaannya, sebanyak 66 orang anggota mundur dari keanggotaan koperasi, jumlah anggota koperasi yang masih terhitung aktif hingga awal tahun 2021 hanyalah sebanyak 33 orang. Pengurangan jumlah anggota ini disebabkan oleh ketidakpuasan anggota terhadap manajemen koperasi, hasil (*reward*) yang mereka peroleh tidak sesuai dengan yang diharapkan dan berhentinya kerjasama

dengan pihak swasta. Sementara itu, temuan pra penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor yang paling kuat mempengaruhi petani untuk membentuk koperasi adalah adanya pengetahuan mereka tentang koperasi. Ini membuktikan bahwa koperasi telah terbentuk dari inisiatif petani dan berkolaborasi dengan pelaku usaha (swasta) dan pemerintah. Namun, masih belum berhasil menciptakan kemandirian koperasi untuk terus berkelanjutan.

Dari beberapa poin diatas muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk aktivitas yang terjadi antara multipihak dalam aksi kolektif?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi multipihak untuk mendorong terciptanya aksi kolektif?
3. Bagaimana *reward system* yang tepat agar aksi kolektif dapat terwujud melalui koperasi untuk pembangunan perkebunan rakyat berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis aksi kolektif multipihak dalam pengelolaan KPTO-SJS
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi aksi kolektif multipihak pada KPTO-SJS
3. Memformulasikan *reward system* untuk aksi kolektif untuk pembangunan perkebunan rakyat berkelanjutan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan bidang studi pembangunan agribisnis, ekonomi pertanian dan koperasi. Adapun secara lebih terperinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat untuk pengetahuan:
 - a. Pengetahuan dan pemahaman tentang aksi kolektif dalam proses pembentukan Koperasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang tindakan kolektif dalam koperasi dan tindakan kolektif

oleh multipihak yang berkolaborasi dalam pembangunan perkebunan rakyat secara khusus dan pembangunan pertanian berkelanjutan secara umum.

- b. Pengetahuan dan pemahaman tentang aspek-aspek oleh multipihak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang aspek-aspek aksi kolektif oleh multipihak yang berkolaborasi untuk dapat mewujudkan pembangunan perkebunan rakyat yang berkelanjutan melalui institusi koperasi yang merupakan salah satu lembaga penunjang dalam subsistem agribisnis.
 - c. Memberikan pengetahuan tentang *reward system* sebagai syarat utama agar aksi kolektif oleh multipihak yang berkolaborasi melalui lembaga koperasi agar dapat berkelanjutan.
2. Manfaat untuk praktek aksi kolektif oleh multipihak yang berkolaborasi melalui koperasi
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada praktik aksi kolektif oleh multipihak yang dilaksanakan melalui koperasi, baik pada perkebunan rakyat, maupun pada praktik-praktik koperasi pada subsektor lainnya agar dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

E. Novelty Penelitian

Penelitian terdahulu tentang koperasi banyak mengamati dan menganalisis hubungan modal sosial antar individu (anggota) yang ada dalam koperasi. Penelitian terkait dengan aksi kolektif oleh multipihak yang berkolaborasi melalui koperasi masih belum banyak ditemukan. Penelitian keberlanjutan agribisnis perkebunan rakyat juga belum banyak membahas tentang lembaga koperasi, pola keberlanjutan yang diukur baru pada tema *partnership* (kemitraan). Dengan demikian *novelty* (kebaharuan) yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah memberikan pengayaan pengetahuan dalam pembangunan agribisnis perkebunan rakyat berkelanjutan melalui koperasi berbasis aksi kolektif yang dilakukan oleh multipihak.

Penelitian mengenai aksi kolektif multipihak untuk perkebunan rakyat berkelanjutan melalui koperasi menawarkan sejumlah perbedaan dan kebaharuan dibandingkan dengan penelitian terdahulu, baik dari segi temuan maupun teori yang digunakan. Salah satu perbedaan utama adalah fokus penelitian ini pada perkebunan

rakyat, yang memiliki karakteristik unik dalam hal skala, jenis tanaman, dan keterlibatan komunitas lokal. Penelitian terdahulu pada perkebunan rakyat lebih banyak terfokus pada pengelolaan koperasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dengan memberikan wawasan khusus tentang dinamika aksi kolektif dalam konteks perkebunan rakyat, yang mungkin melibatkan tantangan dan strategi yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya dan partisipasi anggota koperasi.

Dari segi teori, penelitian ini menggunakan pendekatan aksi kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip desain Elinor Ostrom, serupa dengan beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis aksi kolektif. Namun, penelitian ini juga mengintegrasikan sistem *reward* dalam mendorong partisipasi aktif, yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks perkebunan rakyat. Studi pendahuluan memberikan wawasan tentang pentingnya pengetahuan tradisional dan tantangan komersialisasi, tetapi tidak secara khusus mengkaji bagaimana *reward* dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kombinasi berbagai teori dan pendekatan dapat diterapkan untuk menciptakan sistem pengelolaan perkebunan rakyat yang lebih efektif dan berkelanjutan melalui koperasi.

Formulasi *reward system* yang dirancang sebagai kebaruan dalam penelitian ini adalah dalam rangka untuk memastikan bahwa setiap aktor yang sedang terlibat maupun akan terlibat dalam aksi kolektif mendapatkan pengakuan dan insentif yang sesuai berdasarkan kepada peran yang dilakukannya, baik *reward financial, social, environmental, dan educational* secara berkelanjutan. Pada rancangan ini, jika koperasi bersedia mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya untuk melakukan usahatani organik, maka perusahaan harus bersedia membeli hasil produksi dengan harga yang lebih tinggi. Pemerintah juga harus bersedia menyediakan pembinaan dan pengawasan serta memberikan kebijakan yang mendukung seperti kebijakan hak guna lahan, kebijakan harga, kebijakan pemasaran, serta menjadi jembatan antara perusahaan dengan koperasi dalam hal kerjasama. Aksi kolektif ini diharapkan akan bermuara pada koperasi multipihak yang hanya akan berhasil jika *reward system*-nya berjalan dengan baik.

